



Article Informations
Corresponding Email:
ayudiahning11@gmail.com

Received: 18/07/2025; Accepted:
25/09/2025; Published: 15/10/2025

DETERMINAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA DALAM AKUISISI PELABUHAN HAMBANTOTA DI SRI LANKA TAHUN 2017

Ayu Diahning Safitri¹, Yusep Ginanjar², Nala Nourma Nastiti³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian berjudul Determinan Kebijakan Luar Negeri China dalam Akuisisi Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka Tahun 2017 ini bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik keputusan China dalam mengakuisisi Pelabuhan Hambantota melalui pendekatan determinan kebijakan luar negeri. Masalah utama yang diangkat adalah mengapa China mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk mengakuisisi pelabuhan tersebut, yang kemudian dianalisis melalui kerangka konsep determinan kebijakan luar negeri. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kebijakan luar negeri China, termasuk peran ideologi, persepsi elite pengambil keputusan, tekanan sistem internasional, serta hubungan bilateral China dengan Sri Lanka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi determinan internal dan eksternal. Secara internal, faktor ideologi Partai Komunis China, struktur politik, serta persepsi kepemimpinan Xi Jinping menjadi pendorong utama. Sementara secara eksternal, tekanan dalam lingkungan internasional dan Hubungan China dengan Sri Lanka turut mempengaruhi. Kebijakan ini juga selaras dengan visi Belt and Road Initiative (BRI) China. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan akuisisi China terhadap Pelabuhan Hambantota merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan kontrol atas jalur perdagangan global agar stabil, memperkuat pengaruh di samudra hindia dan posisi geopolitik, serta menanggapi persaingan dengan India dan AS di Indo-Pasifik.

Kata Kunci: China, Determinan, Kebijakan Luar Negeri, *Belt and Road Initiative*, Akuisisi, Hambantota.

Abstract

*This research, titled *Determinants of China's Foreign Policy in the Acquisition of Hambantota Port in Sri Lanka in 2017*, aims to explain the rationale behind China's decision to acquire Hambantota Port through the perspective of foreign policy determinants. The main issue examined is why China enacted a foreign policy decision to acquire the port, which is analyzed using the conceptual framework of foreign policy determinants. This study focuses on identifying internal and external factors influencing China's foreign policy, including the role of ideology, perceptions of key decision-makers, international system pressures, and China's bilateral relations with Sri Lanka. The findings indicate that the acquisition was driven by a combination of internal and external determinants. Internally, the ideology of the Chinese Communist Party, political structure, and the leadership perception of Xi Jinping were key driving forces. Externally, international environmental pressures and China's relationship with Sri Lanka also played influential roles. This policy aligns with China's Belt and Road Initiative (BRI) vision. The results of this study show that China's policy to acquire Hambantota Port is part of a long-term strategy to establish control over global trade routes, strengthen its influence in the Indian Ocean, enhance geopolitical positioning, and respond to competition with India and the United States in the Indo-Pacific region.*

Keywords: *China, Determinants, Foreign Policy, Belt and Road Initiative, Acquisition, Hambantota.*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri China saat ini sangat dipengaruhi oleh inisiatif global *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada 2013. Inisiatif ini dijadikan poros utama strategi pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas ekonomi China dengan berbagai negara mitra di Asia, Afrika, hingga Eropa. BRI mencerminkan visi besar China untuk menciptakan jaringan ekonomi global dan memperluas pengaruh geopolitiknya secara damai namun strategis. Salah satu proyek paling kontroversial dalam kerangka BRI adalah akuisisi Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka pada tahun 2017, yang dilakukan oleh perusahaan pelabuhan milik negara China, China Merchants Port Holdings. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi internasional, termasuk tuduhan *debt-trap diplomacy*, karena Sri Lanka harus menyerahkan pelabuhan tersebut untuk jangka waktu 99 tahun akibat ketidakmampuannya membayar utang pembangunan.

Pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah *Mengapa China mengeluarkan kebijakan untuk mengakuisisi Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka pada tahun 2017?* Hal tersebut menjadi pertanyaan, karena China selalu memberikan narasi-narasi bahwa kebijakan luar negerinya yaitu BRI

merupakan sebuah inisiasi yang saling menguntungkan antara China dan negara Mitra. Penelitian ini kemudian berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan memetakan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri China, serta menganalisisnya melalui pendekatan teori Realisme Neoklasik dan konsep Determinan Kebijakan Luar Negeri menurut Gideon Rose. Penelitian ini penting karena menunjukkan bagaimana BRI tidak hanya merupakan inisiatif ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi luar negeri jangka panjang yang mencerminkan kepentingan nasional China.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis alasan di balik kebijakan luar negeri China dalam akuisisi Pelabuhan Hambantota, serta mengidentifikasi kombinasi faktor internal seperti ideologi, persepsi elite, dan struktur politik dan faktor eksternal seperti tekanan sistem internasional dan hubungan dengan negara lain yang mempengaruhi keputusan tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, yang dianalisis melalui kerangka determinan kebijakan luar negeri menurut Gideon Rose dan teori Realisme Neoklasik.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas kasus Hambantota, namun umumnya dari perspektif Sri Lanka. Misalnya, artikel dengan judul *Game of Loans* karya Jonathan Hillman menjelaskan bagaimana Sri Lanka yang gagal membayar utang akhirnya menyerahkan pelabuhan kepada China selama 99 tahun. Ia menyoroti bahwa keputusan pembangunan pelabuhan itu dilandasi oleh ambisi politik domestik Presiden Mahinda Rajapaksa dan tidak memperhatikan kapasitas pelabuhan Colombo yang sudah ada¹. Artikel ini membantu memperkaya latar kontekstual pada penelitian ini. Perbedaan artikel dengan penelitian ini terletak pada perspektifnya. Artikel karya Hillman ini berfokus pada sudut pandang Sri Lanka dan tidak menguraikan kepentingan dan determinan dari sisi China secara mendalam.

¹ Jonathan Hillman, "Game of Loans: How China Bought Hambantota" *CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES*. (2018), online, Internet, 2 Jun. 2025. , Available: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180717_Hillman_GameofLoans.pdf.

Selanjutnya, penelitian oleh Tessalonica Manuputty dan Agung Yudhistira Nugroho menyoroiti proses lobi dan negosiasi antara Sri Lanka dan China dalam konteks *debt-for-equity swap*. Fokus mereka lebih pada strategi Sri Lanka sebagai pihak yang terdesak secara ekonomi dan bagaimana akhirnya menyerahkan 85% saham pelabuhan kepada China². Meskipun memberikan rincian kronologis dan mengangkat aspek hubungan bilateral, studi ini juga tidak mengkaji secara sistematis faktor-faktor domestik di balik keputusan kebijakan luar negeri China.

Sementara itu, artikel Widya Setiabudi Sumadinata memberikan kerangka analisis yang lebih luas dengan melihat BRI sebagai bagian dari diplomasi ekonomi China yang bertujuan memperkuat hegemoninya di Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa proyek-proyek seperti Hambantota bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan geopolitik China secara regional³. Namun, meskipun memperlihatkan tujuan makro dari BRI, artikel tersebut belum menjelaskan secara mendalam bagaimana pengambilan keputusan spesifik seperti Hambantota dibentuk oleh kombinasi determinan internal dan eksternal.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan memperluas kajian melalui kerangka determinan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur yang ada, tetapi juga menawarkan pendekatan teoritik yang lebih komprehensif dan fokus pada aktor utama, yakni China.

2. PEMBAHASAN

Republik Rakyat China merupakan negara yang mengadopsi ideologi sosialisme dengan karakteristik china, yang mana pada model ini China

² Tessalonica Manuputty and Agung Yudhistira Nugroho, "Analysis of Lobbying and Negotiations of Sri Lanka With China Regarding The Acquisition of Hambantota Port In 2017" *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*. 2.8 (2023): 1797–1810, Available:

<https://jrsem.publikasiindonesia.id/index.php/jrsem/article/view/405/1081>.

³ Widya Setiabudi Sumadinata, "China'S Economic Diplomacy Through the Belt Road Initiative (Bri) To Increase China'S Hegemony in the Southeast Asian Region" *Jurnal Ekonomi*. 12.01 (2023): 2023, Available:

<http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>.

menggabungkan prinsip-prinsip sosialisme dengan elemen ekonomi⁴. China juga memiliki sistem pemerintahan satu partai yang bersifat otoriter dimana kekuasaan politik sepenuhnya dikuasai oleh *the Chinese Communist Party* (CCP)⁵. CCP tidak hanya bertindak sebagai kekuatan politik utama, tetapi juga bertindak sebagai aktor tunggal yang mengarahkan dan mengendalikan semua elemen negara, termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, sosial, dan hubungan luar negeri. Tidak seperti sistem politik demokratis yang menganut pluralisme dan mekanisme *checks and balances*, sistem China menempatkan partai sebagai pusat kekuasaan absolut.

Pada masa kepemimpinan Xi Jinping, struktur kekuasaan dalam tubuh partai mengalami penyatuan yang signifikan, sekaligus memperlihatkan kecenderungan menuju pemusatan kekuasaan pada satu figur tunggal⁶. Sistem politik China dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengenal pemisahan kekuasaan sebagaimana lazimnya negara demokrasi. Struktur kenegaraan di China dioperasikan sebagai perpanjangan tangan dari partai, yang mana semua lembaga pemerintahan, termasuk Dewan Negara, parlemen *National People's Congress* (NPC), dan pengadilan tunduk pada arahan CCP.

Selain itu, Xi Jinping secara aktif memperkuat kekuasaan pribadinya dan mengonsolidasikan kontrol atas lembaga-lembaga utama yang menangani urusan luar negeri. Dalam hal ini, Xi menempatkan dirinya sebagai aktor utama yang mengarahkan jalannya diplomasi China. Proses pengambilan keputusan menjadi semakin terpusat dan dikontrol secara ketat dari pusat.

Sri Lanka merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, tepat di lepas pantai tenggara India. Pulau ini menjadi titik persimpangan penting dalam perdagangan maritim global dan memainkan

⁴ International Department Central Committee of CPC, "Party Constitution," 2018, online, Internet, 31 May 2025. , Available: <https://www.idcpc.org.cn/english2023/tjzl/cpcjj/PartyConstitution/>.

⁵ Lindsay Maizland and Eleanor Albert, "The Chinese Communist Party" *Council on Foreign Relations*. (2022).

⁶ Ibid.

peran geopolitik signifikan, terutama dalam konteks persaingan pengaruh antara India dan China di kawasan Indo-Pasifik⁷.

Hubungan antara China dan Sri Lanka telah berkembang secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20, dengan hubungan diplomatik formal yang telah terjalin sejak 1957. Salah hal paling menonjol dari hubungan ini adalah investasi China dibidang infrastruktur secara besar-besaran di Sri Lanka sejak era Presiden Mahinda Rajapaksa. Proyek-proyek besar seperti Pelabuhan Hambantota, Bandara Internasional Mattala Rajapaksa, Kolombo *Port City*, dan berbagai jalan tol nasional mulai dibangun dengan dana pinjaman dan investasi dari China. Proyek-proyek ini menjadi simbol kedekatan Sri Lanka dengan China, dan sebagian besar diintegrasikan melalui BRI⁸.

Salah satu investasi besar yang diberikan China ke SRI Lanka adalah pendanaan pada proyek Pelabuhan Hambantota. Pelabuhan Internasional Hambantota terletak di pesisir selatan Sri Lanka, posisinya yang strategis di jalur pelayaran Samudera Hindia menjadikannya titik penting dalam rute perdagangan global.

Awalnya Sri Lanka mengajukan permintaan pembiayaan pembangunan pelabuhan ke India pada tahun 2007, namun ditolak oleh pihak India. Setelah penelakan tersebut barulah pemerintah Sri Lanka beralih untuk mengajukan pendanaannya ke China. *Exim Bank of China* menyetujui pinjaman sebesar \$307 juta dengan bunga 6,3% untuk fase pertama pembangunan pelabuhan yang dimulai pada 2008 dan selesai pada 2010. Seiring berjalannya waktu dan dengan peluncuran BRI oleh Presiden Xi Jinping pada 2013, proyek ini secara politis dan simbolis dimasukkan dalam kerangka BRI, meskipun pembangunan awalnya telah berlangsung sebelum inisiatif tersebut resmi diumumkan⁹.

⁷ "About Sri Lanka" *The Consulate General of Sri Lanka in Pakistan*. , 2012, online, Internet, 1 Jun. 2025. , Available: <https://slcgkhi.com/about-sri-lanka/>.

⁸ Grace Asirwatham, "Overview of Sri Lanka-China Relations" *Lakshman Kadirgamar Institute*. , 2018, online, Internet, 1 Jun. 2025. , Available: <https://lki.lk/blog/overview-of-sri-lanka-china-relations/>.

⁹ Nilanthi Samaranyake, "China's Engagement with Smaller South Asian Countries" *United States Institute of Peace*. 446 (2019).

Namun, sejak tahun 2015 Sri Lanka menghadapi krisis fiskal yang serius akibat membengkaknya beban utang luar negeri. Dalam studi kasus Pelabuhan Hambantota, salah satu pinjaman utama untuk pembangunan pelabuhan berasal dari China, yaitu sebesar 307 juta USD dengan bunga 6,3%, pertahun. Tingkat bunga dengan besar 6,3% pertahun ini bahkan disebut jauh lebih tinggi dibandingkan pinjaman dari lembaga pembangunan multilateral¹⁰. Krisis fiskal yang dialami Sri Lanka tersebut kemudian menyebabkan hampir 95% dari pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar cicilan utang pada tahun 2015¹¹.

Dengan adanya krisis tersebut, pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk menyewakan Pelabuhan Hambantota kepada sebuah perusahaan milik negara China yaitu *China Merchants Port Holdings* (CMPort). Kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani pada Juli 2017 dengan 85% saham kepemilikan dipegang oleh China dan pengakuisisian selama 99 tahun¹².

Keputusan China dalam mengakuisisi Pelabuhan Hambantota tidak dapat dipahami hanya sebagai respons terhadap dinamika internasional, tetapi harus dilihat sebagai hasil interaksi determinan internal dan eksternal secara bersamaan. Realisme neoklasik dan determinan kebijakan luar negeri yang digunakan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini memposisikan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan produk dari tekanan sistem internasional dan dinamika domestik yang diterjemahkan oleh pengambil keputusan¹³.

2.1 Faktor Internal

Terdapat tiga determinan internal utama dalam kebijakan luar negeri China yang dapat dianalisis dalam kasus Hambantota yaitu,

¹⁰ Hillman, "Game of Loans: How China Bought Hambantota."

¹¹ Umesh Moramudali and Yunnan Chen, "Beyond Debt: China-Sri Lanka Economic Relations in a New Era" *The Diplomat*, 2025, online, Internet, 3 Jun. 2025. , Available: <https://thediplomat.com/2025/01/beyond-debt-china-sri-lanka-economic-relations-in-a-new-era/>.

¹² Ankit Panda, "Sri Lanka Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease" *The Diplomat*, 11 Dec. 2017, online, Internet, 3 Jun. 2025. , Available: <https://thediplomat.com/2017/12/sri-lanka-formally-hands-over-hambantota-port-to-chinese-firms-on-99-year-lease/>.

¹³ Gideon Rose, "NEOCLASSICAL REALISM AND THEORIES OF FOREIGN POLICY" 1998 (2011): 144–172, Available: <http://journals.cambridge.org/WPO>.

ideologi, struktur politik yang terpusat, serta persepsi pengambil keputusan.

Pertama, ideologi merupakan fondasi utama dalam membentuk persepsi pengambil keputusan terhadap dunia luar serta mempengaruhi arah dan bentuk kebijakan luar negeri¹⁴. Ideologi sosialisme dengan karakteristik China telah berevolusi menjadi pilar penting dalam pembentukan narasi dan tujuan kebijakan luar negeri. Melalui narasi *Chinese Dream*, Xi Jinping menyerukan sebuah visi revitalisasi nasional yang menekankan pembangunan negara kuat, bangsa makmur, dan rakyat sejahtera¹⁵. Ideologi ini terlembagakan dalam BRI, yang diluncurkan sebagai agenda global untuk menghubungkan China dengan kawasan Asia, Afrika, dan Eropa melalui koridor darat dan jalur laut. Hambantota, sebagai pelabuhan utama di jalur maritim Samudra Hindia, masuk dalam rencana besar tersebut. Dalam artikel karya Sumadinata dijelaskan, bahwa BRI bukan sekadar instrumen pembangunan infrastruktur, melainkan cara bagi China untuk mengintegrasikan pengaruh ekonomi ke dalam struktur kawasan yang baru.

Kedua, struktur politik internal China juga memainkan peran penting. Sebagai negara dengan sistem otoriter, China memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang terpusat dan minim hambatan politik. Presiden Xi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal CCP dan Ketua Komisi Militer Pusat, mengonsolidasikan kekuasaan politiknya sejak Kongres Nasional ke-19 pada 2017. Dengan demikian, keputusan strategis seperti akuisisi pelabuhan dengan durasi konsesi 99 tahun dapat dilakukan tanpa perlu konsultasi dengan parlemen atau partai oposisi¹⁶. Kebijakan luar negeri di bawah sistem ini lebih stabil, konsisten, dan berkelanjutan, serta sangat dipengaruhi

¹⁴ Michael A. Peters, "The Chinese Dream: Xi Jinping thought on Socialism with Chinese characteristics for a new era" *Educational Philosophy and Theory*. 49.14 (2017): 1299–1304, Available: <https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1407578>.

¹⁵ "Xi Jinping, Achieving Rejuvenation Is the Dream of the Chinese People" *USC US-China Institute*. , 2012, online, Internet, 29 Jun. 2025. , Available: <https://china.usc.edu/node/21227>.

¹⁶ Hillman, "Game of Loans: How China Bought Hambantota."

oleh persepsi pengambil keputusan terhadap ancaman dan peluang eksternal.

Ketiga, persepsi pengambil kebijakan berperan besar dalam membentuk arah kebijakan. Xi Jinping dan CCP memiliki visi jangka panjang untuk mentransformasi China sebagai pemimpin global yang. Ia melihat BRI sebagai sarana untuk membentuk tatanan internasional baru di mana negara-negara berkembang menjalin hubungan baik dengan China. Dalam konteks ini, Hambantota dipersepsikan bukan hanya sebagai pelabuhan kosong, tetapi sebagai titik strategis yang dapat memperluas jangkauan geopolitik China di Samudra Hindia. Hambantota bahkan disebut-sebut memungkinkan power projection militer, mengingat kedalaman dermaga yang mampu menampung kapal logistik dan kapal selam, meski secara formal proyek ini bersifat sipil¹⁷. Keputusan ini dengan demikian mencerminkan ambisi pengambil kebijakan, terutama Xi Jinping dan CCP, yang mengaitkan keberhasilan BRI dengan legitimasi politiknya di dalam negeri.

2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi keputusan China dalam mengakuisisi Pelabuhan Hambantota juga tidak kalah signifikan. Terdapat dua kelompok utama yaitu tekaann lingkungan internasional dan hubungan dengan negara lain.

Pertama dari sudut pandang tekaann lingkungan internasional, sistem internasional di kawasan Indo-Pasifik mengalami transformasi besar akibat meningkatnya rivalitas antara kekuatan besar, terutama China, Amerika Serikat, dan India. Samudra Hindia menjadi kawasan strategis baru karena menjadi jalur utama bagi perdagangan energi global dan aktivitas militer maritim. Di tengah kompetisi ini, Hambantota menjadi aset yang sangat berharga. Terletak hanya beberapa mil dari rute pelayaran tersibuk dunia, pelabuhan ini memberi peluang bagi China untuk memperkuat posisi logistiknya. Reaksi kebijakan China tercermin dalam dokumen dan pernyataan resmi

¹⁷ Manuputty and Nugroho, "Analysis of Lobbying and Negotiations of Sri Lanka With China Regarding The Acquisition of Hambantota Port In 2017."

pemerintahan. Dokumen kebijakan maritim resmi China, *Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative* pada Juni 2017, yang menekankan bahwa perlunya membangun jalur transportasi maritim yang tidak terhambat, aman, dan efisien serta memperkuat kerjasama keamanan maritim¹⁸.

Kedua, hubungan dengan negara lain, khususnya Sri Lanka menyediakan celah yang memungkinkan pengambilalihan pelabuhan tersebut. Pembangunan Hambantota awalnya dilakukan melalui pinjaman dari Exim Bank of China dengan bunga tinggi dan tenor pendek¹⁹. Namun ternyata, proyek itu tidak mendatangkan keuntungan seperti yang diharapkan. Akibatnya, pemerintah Sri Lanka menghadapi tekanan utang besar dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam situasi terdesak ini, China menawarkan skema *debt for equity swap*, yaitu utang ditukar dengan kepemilikan aset. Pada Juli 2017, kesepakatan dicapai di mana 85% saham pelabuhan diserahkan kepada China Merchants Port Holdings, dan China diberikan hak konsesi selama 99 tahun²⁰. Kesepakatan ini dinilai oleh beberapa pengamat sebagai keberhasilan diplomasi ekonomi China yang memanfaatkan krisis untuk memperluas kontrol.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa, akuisisi Pelabuhan Hambantota oleh China dipengaruhi faktor eksternal yaitu hubungan antar negara. Hubungan baik antara China dan Sri Lanka, terutama saat masa pemerintahan Rajapaksa yang cenderung pro-China, membuat pemerintah China memandang Hambantota sebagai peluang strategis yang patut dikejar.

¹⁸ The State Council of China, "Full text of the Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative" *The State Council The People's Republic of China*. , 20 Jun. 2017, online, Internet, 6 Jul. 2025. , Available: https://english.www.gov.cn/archive/publications/2017/06/20/content_281475691873460.htm.

¹⁹ Dr Sabahat Jaleel, Husna Noor, and Bakhtiar Ahmed, "Lease Agreement Issue of the Hambantota and Gwadar Port: a Comparative Analysis" *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)*. 4.1 (2023): 51-64.

²⁰ Manuputty and Nugroho, "Analysis of Lobbying and Negotiations of Sri Lanka With China Regarding The Acquisition of Hambantota Port In 2017."

China juga meyakini bahwa hubungan bilateral yang kuat dengan Sri Lanka ini kemudian menghapuskan kekhawatiran akan risiko politik dan kemudian memfasilitasi pertukaran ekonomi. Sebagai hasilnya, pemerintah China mengambil langkah untuk mengintegrasikan Hambantota ke dalam jaringan BRI. Dalam kasus lainnya misal jika hubungan China dan Sri Lanka tidak sedekat itu, kemungkinan besar China akan lebih berhati-hati atau bahkan menolak mengambil alih pelabuhan dengan latar belakang risiko utang. Oleh karena itu, hubungan baik dengan Sri Lanka menjadi determinan penting yang menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri China dapat bergerak secara strategis dalam kasus Hambantota.

Sehingga, dalam kasus ini faktor internal seperti ideologi, struktur politik, dan persepsi pengambil keputusan memiliki pengaruh langsung dalam membentuk arah kebijakan luar negeri China. Ideologi memberikan kerangka dasar terhadap perluasan kebijakan luar negeri melalui proyek BRI. Struktur politik yang tersentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang cepat dan tegas. Sedangkan persepsi pengambil kebijakan seperti Xi Jinping memainkan peran kunci dalam menyatakan visi China sebagai kekuatan global.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti tekanan lingkungan internasional dan hubungan dengan negara lain juga memperkuat dorongan kebijakan tersebut. Tekanan lingkungan internasional, terutama persaingan strategis dengan India dan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, menjadi salah satu faktor eksternal yang mendorong China untuk mengamankan kepentingannya melalui akuisisi Pelabuhan Hambantota. Sedangkan hubungan erat dengan Sri Lanka membuka jalan bagi akuisisi yang relatif mulus. Dengan demikian, determinan kebijakan luar negeri China dalam kasus Hambantota merupakan hasil dari interaksi erat antara kondisi domestik dan internasional yang saling menguatkan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ada ditemukan bahwa keputusan China untuk mengakuisisi Pelabuhan Hambantota merupakan hasil dari

interaksi antara determinan internal dan eksternal. Faktor internal mencakup ideologi *chinese dream*, struktur politik China yang terpusat, serta persepsi CCP dan Xi Jinping sebagai pemimpin yang ambisius terhadap peran global China. Ketiga faktor internal tersebut memberikan landasan bagi China untuk mengambil suatu kebijakan, termasuk akuisisi Pelabuhan Hambantota. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pengakuisisian ini mencakup tekanan lingkungan internasional terutama ketegangan yang terjadi di Kawasan indo-pasifik, serta hubungan bilateral yang erat dengan Sri Lanka. Dari keseluruhan determinan, faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor internal khususnya persepsi pengambil keputusan. Dalam konteks ini, persepsi Xi Jinping mengenai pentingnya Hambantota dalam BRI dan upaya memperkuat status China sebagai kekuatan besar dunia menjadi pendorong utama di balik keputusan akuisisi.

REFERENSI

- Asirwatham, Grace. "Overview of Sri Lanka-China Relations." *Lakshman Kadirgamar Institute*, 2018. Online. Internet. 1 Jun. 2025. . Available: <https://lki.lk/blog/overview-of-sri-lanka-china-relations/>.
- Hillman, Jonathan. " Game of Loans: How China Bought Hambantota." *CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES* (2018). Online. Internet. 2 Jun. 2025. . Available: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180717_Hillman_GameofLoans.pdf.
- International Departement Central Committee of CPC. "Party Constitution," 2018. Online. Internet. 31 May 2025. . Available: <https://www.idcpc.org.cn/english2023/tjzl/cpcjj/PartyConstitution/>.
- Jaleel, Dr Sabahat, Husna Noor, and Bakhtiar Ahmed. "Lease Agreement Issue of the Hambantota and Gwadar Port: a Comparative Analysis." *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)* 4.1 (2023): 51–64.
- Maizland, Lindsay, and Eleanor Albert. "The Chinese Communist Party." *Council on Foreign Relations* (2022).
- Manuputty, Tessalonica, and Agung Yudhistira Nugroho. "Analysis of Lobbying and Negotiations of Sri Lanka With China Regarding The Acquisition of Hambantota Port In 2017." *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2.8 (2023): 1797–1810. Available: <https://jrsem.publikasiindonesia.id/index.php/jrsem/article/view/405/1081>.
- Moramudali, Umesh, and Yunnan Chen. "Beyond Debt: China-Sri Lanka Economic Relations in a New Era." *The Diplomat*, 2025. Online. Internet. 3 Jun. 2025. . Available: <https://thediplomat.com/2025/01/beyond-debt-china-sri-lanka-economic-relations-in-a-new-era/>.
- Panda, Ankit. "Sri Lanka Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease." *The Diplomat*, 11 Dec. 2017. Online. Internet. 3 Jun. 2025. . Available: <https://thediplomat.com/2017/12/sri-lanka-formally-hands-over-hambantota-port-to-chinese-firms-on-99-year-lease/>.
- Peters, Michael A. "The Chinese Dream: Xi Jinping thought on Socialism with

- Chinese characteristics for a new era.” *Educational Philosophy and Theory* 49.14 (2017): 1299–1304. Available: <https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1407578>.
- Rose, Gideon. “NEOCLASSICAL REALISM AND THEORIES OF FOREIGN POLICY” 1998 (2011): 144–172. Available: <http://journals.cambridge.org/WPO>.
- Samaranayake, Nilanthi. “China’s Engagement with Smaller South Asian Countries.” *United States Institute of Peace* 446 (2019).
- Sumadinata, Widya Setiabudi. “China’S Economic Diplomacy Through the Belt Road Initiative (Bri) To Increase China’S Hegemony in the Southeast Asian Region.” *Jurnal Ekonomi* 12.01 (2023): 2023. Available: <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>.
- The State Council of China. “Full text of the Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative.” *The State Council The People’s Republic of China*, 20 Jun. 2017. Online. Internet. 6 Jul. 2025. . Available: https://english.www.gov.cn/archive/publications/2017/06/20/content_281475691873460.htm.
- “About Sri Lanka.” *The Consulate General of Sri Lanka in Pakistan*, 2012. Online. Internet. 1 Jun. 2025. . Available: <https://slcgkhi.com/about-sri-lanka/>.
- “Xi Jinping, Achieving Rejuvenation Is the Dream of the Chinese People.” *USC US-China Institute*, 2012. Online. Internet. 29 Jun. 2025. . Available: <https://china.usc.edu/node/21227>.